

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang kita diami terdiri atas dua komponen utama yaitu biotik (makhluk hidup) dan abiotik (makhluk tak hidup). Kedua komponen itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Dengan kata lain perubahan dari komponen biotik akan berpengaruh terhadap komponen abiotik, begitu juga sebaliknya. Ketika suatu keadaan sudah tidak lagi seimbang karena sesuatu hal, akan mempengaruhi kehidupan organisme dan ekosistem di sekitarnya. Termasuk pertumbuhan populasi penduduk di bumi, akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya.

Populasi penduduk dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan menurut data dari *World Population Data Sheet* pada tahun 2011 penduduk dunia berjumlah 6,98 milyar orang. Sedangkan penduduk Indonesia berjumlah 238 juta atau berada di urutan 4 dalam hal banyaknya jumlah penduduk di bawah China, India, dan USA. Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,3% pertahun yang tergolong sangat tinggi. Diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 akan mencapai 309 juta jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, berarti jumlah kebutuhan dasar penduduk juga akan semakin meningkat. Sehingga mendorong suatu perilaku yang konsumtif dalam masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh

Nurdjaman (1993) bahwa laju timbulan sampah akan bertambah seiring dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu dapat dicermati bahwa jenis dan kualitas sampah juga bertambah seiring dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumeristis.

Peningkatan kebutuhan dasar yang bersifat konsumtif sangat mungkin meningkatkan potensi timbulan sampah dari barang yang dikonsumsi, terutama di daerah perkotaan. Pertumbuhan jumlah sampah di kota-kota di Indonesia setiap tahun meningkat secara tajam. Timbulan sampah di seluruh Indonesia diestimasikan sebesar 38,5 juta ton/tahun, dan di kota metropolitan/besar (26 kota) menghasilkan 14,1 juta ton sampah per tahun dengan total penduduk 40,1 juta (Statistik Persampahan Indonesia, 2008). Di kota Bandung, pada tahun 2005 volume sampahnya sebanyak 7.400 m³ per hari; dan pada tahun 2006 telah mencapai 7.900 m³ per hari. Selain itu, di Jakarta, pada tahun 2005 volume sampah yang dihasilkan sebanyak 25.659 m³/hari; dan pada tahun 2006 telah mencapai 26,880 m³/hari (Suganda dalam Faizah, 2008:9).

Peningkatan volume sampah berpeluang menimbulkan masalah-masalah lingkungan sebagaimana diungkapkan oleh Alkadri *et al* (1999:163) bahwa:

Perkembangan kota akan diikuti pertambahan jumlah penduduk, yang juga akan diikuti oleh masalah-masalah sosial dan lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang muncul adalah masalah persampahan. Permasalahan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

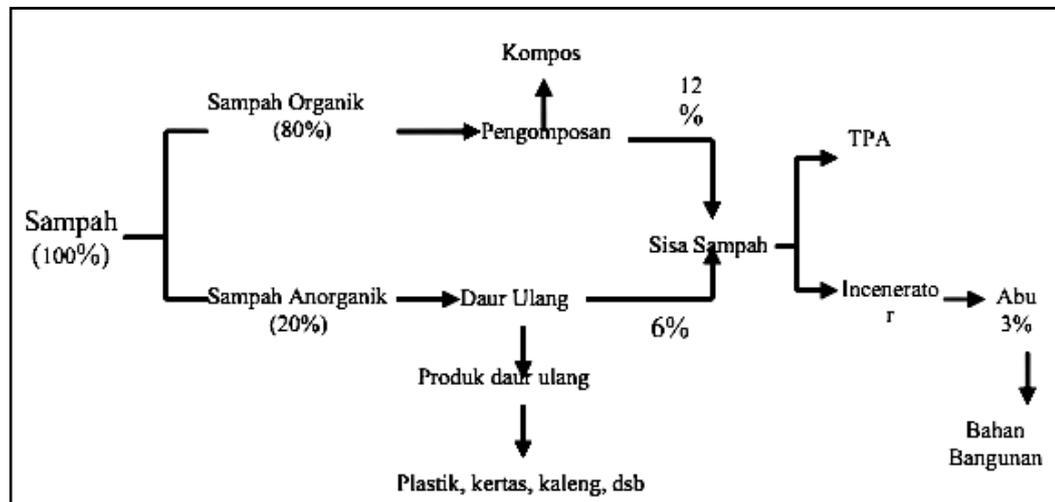
Penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dapat berpengaruh terhadap beberapa bagian kehidupan. Dampak terhadap kesehatan yaitu bahwa sampah dapat menjadi pembawa penyakit seperti diare, tifus, dan demam

berdarah. Dampak terhadap lingkungan dapat terlihat dari tercemarnya air tempat berbagai macam organisme hidup, lenyapnya spesies tertentu yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Aspek sosial ekonomi masyarakat pun akan terganggu, mulai dari munculnya bau kurang sedap, terganggunya keindahan lingkungan yang akan berdampak buruk terhadap kepariwisataan, serta dapat pula menimbulkan potensi banjir karena sampah menyumbat saluran air.

Untuk mencapai masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (*Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006*).

Untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan sampah tersebut, maka pengelolaan sampah menjadi suatu keharusan terutama bagi kota-kota besar di Indonesia. Tentu saja pengelolaan tersebut harus bersifat terpadu dan menyeluruh agar masalah kompleks yang ditimbulkan sampah dapat teratasi secara tuntas. Semakin majunya perkembangan zaman, ilmu dan teknologi berperan besar dalam keilmuan pengelolaan sampah. Paradigma lama yang berkembang dalam masyarakat yaitu “kumpul-angkut-buang”, mulai berubah ke arah yang lebih bijak yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Contohnya adalah konsep *zero waste* dalam mengelola sampah yang bertujuan untuk “meng-nolkan sampah”. *Zero waste* adalah: ‘konsep

pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi proses pengurangan volume timbulan sampah' (Babassari dalam Yuniarti, 2004:43).



Sumber: Bebbasari dalam Yunarti, 2004

Gambar 1.1
Konsep Zero Waste

Menurut konsep di atas salah satu bentuk pengolahan sampah adalah menjadikan sampah menjadi kompos melalui pengomposan. Sedangkan untuk sampah anorganik akan didaur ulang. Persentase sampah anorganik lebih kecil yaitu sebesar 20% bukan berarti pengolahan menjadi lebih mudah dari pada sampah organik. Sampah anorganik bisa saja didaur ulang, tetapi proses sebelum didaur ulang juga kadang kala tidaklah mudah. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa bagian perkotaan yang menunjukkan sampah plastik berserakan dan bahkan menyumbat saluran air. Daur ulang akan berjalan baik jika sampah anorganik terkumpul secara benar.

Kota Cimahi seperti kota-kota lain pada umumnya terus mengalami pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2008 berjumlah 551.216 penduduk, tahun 2009 meningkat menjadi 566.220 penduduk, dan data terakhir tahun 2011

menunjukkan 612.168 penduduk. Dengan kata lain rata-rata pertumbuhan penduduknya sebesar 2,36% pertahun (*Kota Cimahi Dalam Angka 2009, 2010, BPS Kota Cimahi*). Seperti dikatakan sebelumnya bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan juga.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi Tahun 2011, volume sampah saat ini mencapai 1407 m³/hari. Jumlah tersebut membuat pemkot Cimahi harus mengeluarkan Rp 1,5 miliar setiap tahun untuk kompensasi jasa pelayanan (KPJ) dan kompensasi dampak negatif (KDN) penggunaan TPPAS Sarimukti. Dengan adanya laporan tersebut, berarti biaya yang dikeluarkan oleh pemkot Cimahi sangatlah besar hanya untuk masalah sampah saja. Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi di akhir tahun 2011, baru sekitar 914 m³/hari (65%) sampah yang dikelola DKP sedangkan sisanya 492,5 m³/hari (35%) dikelola masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak sampah yang harus dikelola masyarakat.

Mendengar kata “sampah” mungkin untuk beberapa orang akan terbayang sesuatu hal yang menjijikan, barang tidak berguna, atau mungkin hal yang kotor. Namun dibalik pandangan tersebut, sampah dapat diubah menjadi barang yang berguna bahkan bernilai ekonomi. Untuk sampah organik, sisa sampdijah tersebut dapat dibuat kompos yang selanjutnya dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Pupuk kompos tersebut dapat dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk sampah anorganik, beberapa jenis barang dapat didaur ulang. Adanya usaha daur ulang sampah membuktikan bahwa kegiatan tersebut bernilai ekonomi. Bahkan sampah dapat diubah menjadi sumber energi dari proses fermentasinya,

yang biasa kita kenal dengan istilah Biogas. Energi dari biogas lebih ramah lingkungan karena pembakarannya menghasilkan polutan yang minim. Itulah sisi lain sampah yang mungkin selama ini kita hanya mengenal sisi buruknya saja.

Kota Cimahi pun tidak ketinggalan melihat peluang pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi tersebut. Berbagai jenis pengolahan sudah teraplikasikan di Kota Cimahi, mulai dari pengomposan, biogas, dan daur ulang.

Salah satu bentuk pengolahan sampah yang ada di Kota Cimahi adalah Bank Sampah. Sebuah istilah yang mungkin terdengar agak asing di telinga kita. Tujuan dari adanya Bank Sampah ini adalah mengurangi jumlah sampah anorganik serta memberikan imbalan terhadap penabung sampahnya. Seperti halnya bank yang kita kenal, terdapat direktur, pengurus, dan nasabahnya juga. Sampah diperoleh dari nasabah, yang nanti jika sudah terkumpul akan dijual kembali oleh pengurus kepada pengepul ataupun bandar. Saati ini di Kota Cimahi setidaknya sudah ada 7 Banks Sampah yang mengakomodir pengelolaan sampah anorganik. Berikut merupakan lokasinya:

Tabel 1.1
Lokasi Bank Sampah di Kota Cimahi

NO	LOKASI BANK SAMPAH	KECAMATAN	KATEGORI
1	RW 09 Kelurahan Cimahi	Cimahi Tengah	Perumahan
2	RW 08 Perumahan Sriwijaya	Cimahi Tengah	Perumahan
3	Cipageran	Cimahi Utara	Perumahan
4	SMKN 3 Cimahi	Cimahi Utara	Sekolah
5	SMPN 2 Cimahi	Cimahi Tengah	Sekolah
6	SMKN 1 Cimahi	Cimahi Selatan	Sekolah

Sumber: DKP Kota Cimahi, 2011

Bank Sampah merupakan solusi penanganan sampah yang berbasis masyarakat. Karena di dalamnya masyarakat benar-benar dilibatkan dalam pengelolaan sampah melalui proses pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum disetorkan kepada Bank Sampah. Dengan adanya Bank Sampah kebiasaan masyarakat untuk memilah sebelum membuang akan terbentuk karena terbiasa. Penyatuan sampah organik dan anorganik bukanlah hal yang bijak.

Bank Sampah pertama kali dibentuk di Bantul, Yogyakarta oleh seorang dosen kesehatan pada tahun 2008. Bank Sampah kini tidak hanya menjangkau nasabah dari dusun setempat, melainkan juga siswa di sejumlah sekolah. Sebanyak 150 desa di Indonesia mengadopsi sistem pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan (Syukri dalam digilib-ampl.net). Beberapa daerah yang berhasil mengaplikasikan konsep ini diantaranya adalah Bantul, Malang, Depok, dan Palembang. Omzet Bank Sampah Perumahan Griya Bahagia di Palembang, Sumatera Selatan, mencapai Rp 9.000.000,00 setiap bulannya. Pendapatan ini diperoleh dari menjual sampah, pupuk kompos, serta kerajinan dari sampah (Sarwidaningrum dan Azis dalam Kompas). Dalam beberapa kasus Bank Sampah tidak hanya mengakomodir sampah anorganik saja, tetapi juga dalam kompleks Bank Sampah tersebut ada pengomposan dan kerajinan barang-barang bekas. Keberadaan Bank Sampah sangat penting jika melihat fakta tentang volume dan dampak sampah. Apalagi ada keuntungan secara ekonomi.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji keberadaan Bank Sampah yang ada di kota

Cimahi, bagaimana Bank Sampah tersebut bekerja memberdayakan masyarakat dan melihat implementasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi penelitian dan permasalahan, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah di kota Cimahi ?
2. Bagaimana pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di kota Cimahi?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi Bank Sampah di kota Cimahi ?

C. Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi pengelolaan sampah di kota Cimahi.
2. Untuk mengidentifikasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di kota Cimahi.
4. Untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam implementasi Bank Sampah di kota Cimahi.

D. Manfaat

1. Bagi dunia pendidikan sebagai tambahan referensi keilmuan tentang permasalahan sampah beserta pengelolaannya melalui Bank Sampah.
2. Bagi masyarakat umum untuk menanamkan nilai pentingnya mengelola sampah secara bijak.

3. Bagi aparat pemerintah daerah lain, sebagai bahan contoh pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. **Pengelolaan** : Dalam KBBI, pengelolaan dapat diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
2. **Sampah** : Dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.
3. **Bank Sampah** : Bank Sampah adalah Salah satu strategi penerapan pemilahan dalam upaya pembatasan sampah yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dengan pola insentif. Pelaksanaan Bank Sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Melalui Bank Sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk membiasakan masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan sampah serupa uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan anak-anak. Akhirnya masyarakat terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah yang pada

gilirannya akan membatasi timbulan sampah. Dengan mengembangkan Bank Sampah menumbuhkan perekonomian kerakyatan.” (Kutipan sambutan Menteri Lingkungan Hidup-Muh.Hatta- dalam rakernis Bank Sampah 11-13 September 2011 di Yogyakarta).

